



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MEURAH BUDIMAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
3. NHK : 262534

**II. DATA HARTA**

	Rp.	2.338.500.000
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	2.338.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 649 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.825.000.000		
2. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA NAGAN RAYA, Rp. 35.000.000		
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	236.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
3. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	156.936.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	27.581.856
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.759.017.856

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.759.017.856

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.